

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KESEMPATAN KERJA

Tulus Tambunan (1996:64), Kesempatan kerja mempunyai pengertian termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan yang masih lowong (*vacancy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja yang datang, misalnya perusahaan (swasta maupun pemerintah) dan departemen. Adanya kebutuhan tersebut, berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang secara riil dibutuhkan oleh perusahaan tergantung pada banyak faktor. Di antaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan yang meminta tenaga kerja, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga dari faktor produksi lainnya, misalnya barang modal. Tingkat produktivitas seseorang juga sangat tergantung pada kesempatan yang tersedia, kesempatan dalam hal ini sekaligus berarti :

1. Kesempatan untuk bekerja.
2. Pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan tiap-tiap orang.
3. Kesempatan untuk mengembangkan diri.

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk di isi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan

pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi dan hal ini lazim disebut kebutuhan tenaga kerja. Biasanya sulit untuk memperoleh data tentang kesempatan kerja, maka untuk keperluan praktis umumnya jumlah kesempatan kerja didekati dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (*employed*). (Djuhari, 1998:66)

Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh **Sri Roshidayati (Barthos: 1990)** Kesempatan kerja berkaitan dengan peluang yang tersedia bagi tenaga kerja untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dimana kesempatan kerja sebagai kegiatan dari perusahaan atau usaha atau instansi dimana seseorang dapat bekerja. Pengertian semacam ini memetekan kesempatan kerja dalam arti sempit yaitu kesempatan kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaan atau instansi tertentu, sehingga tidak memperhitungkan kemungkinan lain dimana tenaga kerja tidak bekerja secara teikat pada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Pengertian kesempatan kerja dalam analisis ekonomi makro memiliki dimensi yang amat luas.

Berbicara mengenai kesempatan kerja maka membicarakan mengenai ketenagakerjaan. Dimana kita juga perlu mengetahui beberapa istilah mengenai ketenagakerjaan. Dimana istilah ketenagakerjaan masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan atau penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. Batas usia kerja di Indonesia adalah minimum untuk saat ini

adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja atau *Manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) pelajar dan mahasiswa, (2) pengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Tenaga kerja = Angkatan kerja + Bukan Angkatan Kerja

(Payaman J. Simanjuntak, 1985:3)

2. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah sebagian jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif dan pasif mencari suatu pekerjaan. Dengan kata lain juga dapat dikatakan, bahwa angkatan kerja ialah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui angkatan kerja disini terdiri dari penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Penduduk yang sudah bekerja merupakan penduduk yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Dan penduduk yang tidak bekerja, merupakan penduduk yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau sering disebut dengan pengangguran. (Payaman J. Simanjuntak, 1985:3)

3. Bukan Angkatan kerja

Telah kita ketahui dalam tenaga kerja terdapat kelompok bukan angkatan kerja, dimana kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) pelajar dan

mahasiswa (2) pengurus rumah tangga dan (3) penerima pendapatan lain. Yang tergolong dalam penerima pendapatan lain ini ada dua macam, yaitu : (a) penerima pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan sewa atas milik dan (b) mereka yang hidup tergantung dari orang misalnya karena lanjut usia, cacat, dala penjara atau sakit.

Pada dasarnya mereka yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali kelompok (3) sewaktu-waktu dapat terjun untuk ikut bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini dapat juga disebut angkatan kerja potensial (*potential labor force*). (Payaman J. Simanjuntak, 1985:6)

4. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Dengan asumsi jumlah penduduk tetap, maka apabila jumlah angkatan kerjanya meningkat, maka TPAK-nya meningkat. Besarnya TPAK dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TPAK = \frac{JAK}{JPUK} \times 100\% \quad (\text{Suseno Triyanto Widodo, 1990:108})$$

Dimana : JAK = Jumlah Angkatan Kerja

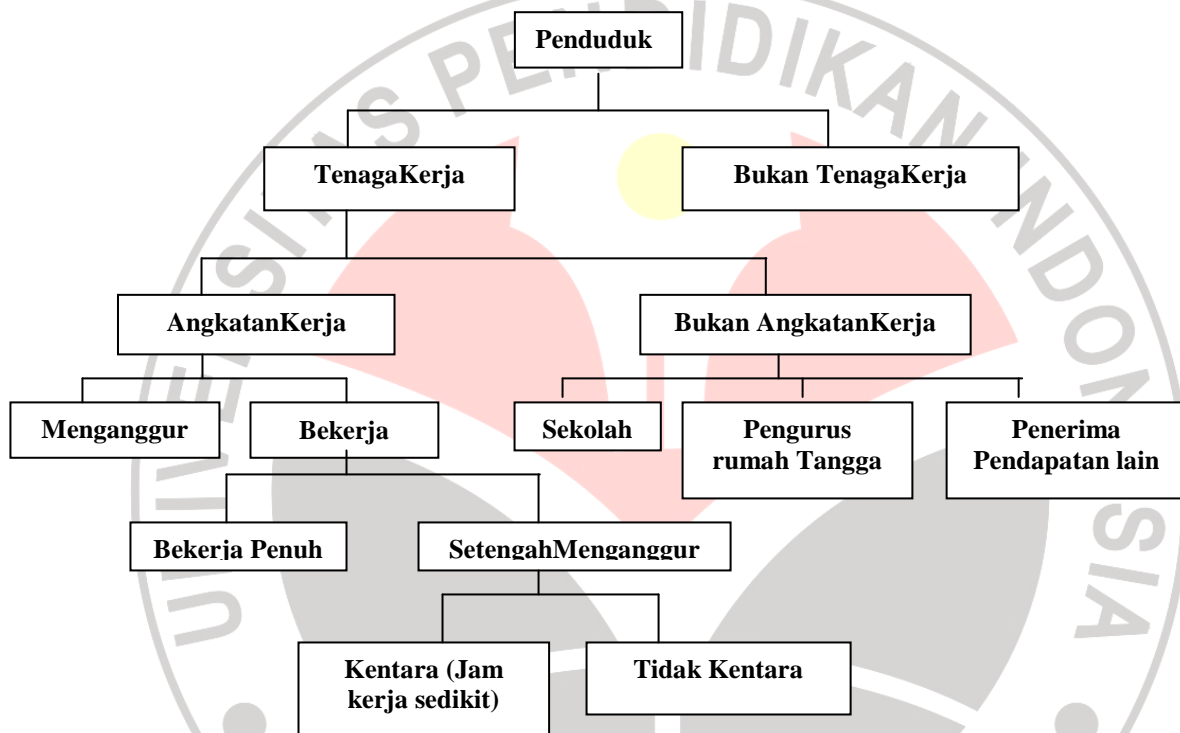
JPUK = Jumlah Penduduk Usia Kerja

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK menurut **Suseno Triyanto Widodo (1990:108)**, yaitu :

- a) Jumlah penduduk yang bersekolah dan ibu-ibu mengurus rumah tangga.
- b) Usia penduduk.

- c) Pendapatan rumah tangga/keluarga.
- d) Tingkat pendidikan.

Komponen-komponen ketenagakerjaan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bagan dibawah ini. Dimana bagan ini dapat menggambarkan hubungan antara komposisi penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran.



Gambar 2.1. Komposisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

Sumber: Payaman J. Simanjuntak

2.1.1. Elastisitas Permintaan Akan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja didefinisikan sebagai presentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan :

$$e = \frac{\Delta N / N}{\Delta W / W} \quad (2.1)$$

(Payaman Simanjuntak, 1985:76)

Dimana :

e = elastisitas permintaan akan tenaga kerja,

ΔN = perubahan jumlah pekerja yang terjadi

N = jumlah yang bekerja mula-mula

ΔW = besarnya perubahan tingkat upah

W = tingkat upah yang sedang berlaku.

Selanjutnya rumus (1) dapat ditulis dalam bentuk :

$$e = \frac{\Delta N}{\Delta W} \times \frac{W}{N} \quad (2.2)$$

(Payaman Simajuntak, 1985:77)

atau dalam bentuk diferensial :

$$e = \frac{dN}{dW} \times \frac{W}{N} \quad (2.3)$$

(Payaman Simajuntak, 1985:77)

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan sebaliknya. Jadi $\frac{\Delta N}{\Delta W}$ dalam persamaan (2.2) dan $\frac{dN}{dW}$ dalam persamaan (2.3) adalah negative. Oleh sebab itu elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya elastitas permintaan tenaga kerja tergantung dari empat factor, yaitu :

- 1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan factor produksi yang lain, misalnya modal.

- 2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan
- 3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi
- 4) Elastisitas persediaan dari factor produksi pelengkap lainnya.

(Payaman J. Simanjuntak, 1985:77)

2.1.2. Kesempatan Kerja Pandangan Klasik

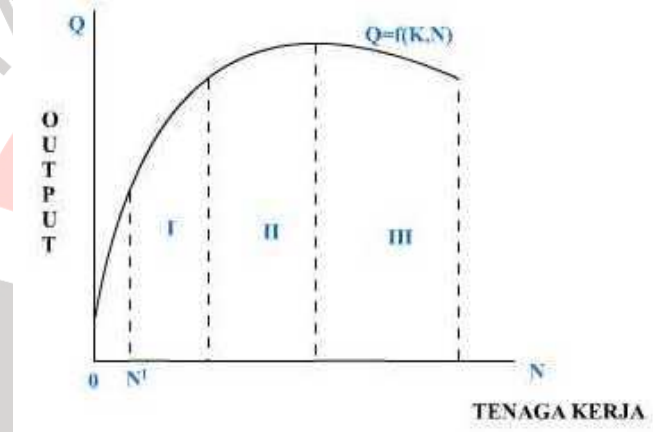
Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai dalam perekonomian. Pengangguran merupakan salah masalah yang bersifat sementara. Sekiranya ada kekurangan kesempatan kerja, system pasaran akan dengan sendirinya melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya kesempatan kerja penuh tercapai kembali. Pandangan teori klasik tersebut didasari oleh dua alasan penting yang melandasi keyakinan tersebut yaitu *pertama*, dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat dan *kedua* fleksibilitas upah akan mengembalikan keseimbangan di pasaran tenaga kerja. (Sadono Sukirno, 1994:285).

Pandangan klasik bahwa perekonomian tidak akan kekurangan permintaan agregat berarti segala barang yang diproduksi akan dapat dijual, tingkat produksi nasional dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Atas dasar tersebut jumlah produksi (output) sebagai dasar untuk menentukan kesempatan kerja. Dan hubungan antara tenaga kerja dengan output yaitu melalui *fungsi produksi*. Fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi yang akan dihasilkan dengan

jumlah faktor produksi (tenaga kerja) yang digunakan dalam suatu proses produksi. secara sederhana fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Q=f(K,N) \quad (2.4)$$

dengan asumsi, dalam jangka pendek tenaga kerja(N) merupakan satu-satunya input yang dapat diubah-ubah penggunaannya, sedangkan faktor produksi lainnya seperti modal (K) ditentukan pada tingkat penggunaan tertentu. (Djuhari, 1998:15)



Gambar 2.2. Kurva Fungsi Produksi

Sumber : Djuhari, 1998:16

Gambar 2.2. merupakan kurva fungsi produksi dimana menggambarkan hubungan antara jumlah tenaga kerja (N) dengan produksi yang dihasilkan (Q), dimana terdapat tiga tahapan proses produksi yaitu:

1. Tahap pertama, yaitu tahap produksi dimana produk total mengalami pertambahan yang semakin lama semakin besar. Artinya jika produsen menambah tenaga kerja maka produk total yang dihasilkan akan bertambah dengan penambahan yang semakin besar.
2. Tahap kedua, yaitu tahap produksi dimana produk total mengalami pertambahan yang semakin lama semakin kecil. Artinya jika produsen

menambah tenaga kerja maka produk total akan bertambah dengan pertambahannya semakin lama semakin kecil.

3. Tahap ketiga, yaitu produksi total semakin lama semakin berkurang. Artinya jika produsen menambah tenaga kerja maka produk total yang dihasilkan akan berkurang. Hal ini dikarenakan adanya *law deminishing return* (Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang).

Analisis klasik adalah dilandaskan kepada sistem ekonomi yang bersifat pasar bebas berarti setiap pasar, termasuk pasaran tenaga kerja, merupakan pasar yang berarti pasar persaingan sempurna. Dalam pasar seperti ini tingkat harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam konteks pasar tenaga kerja, mekanisme pasar yang demikian berarti bahwa tingkat upah ditentukan oleh keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. apabila keadaan ini tercapai, dalam analisis klasik, tingkat kesempatan kerja penuh telah tercapai. Penentuan tingkat kesempatan kerja dalam teori klasik ditentukan oleh (1). Menentukan kesempatan kerja (2). Menentukan kurva penawaran tenaga kerja dan (3). Menentukan keseimbangan dan perubahan keseimbangan di pasaran tenaga kerja. **(Sadono Sukirno, 2004:68)**

Kesempatan kerja dan tingkat upah ditentukan secara simultan (dengan berbagai harga dan faktor lainnya yang digunakan dalam perekonomian oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (suplly). **(J.J. Sarungu, 2004:183)**

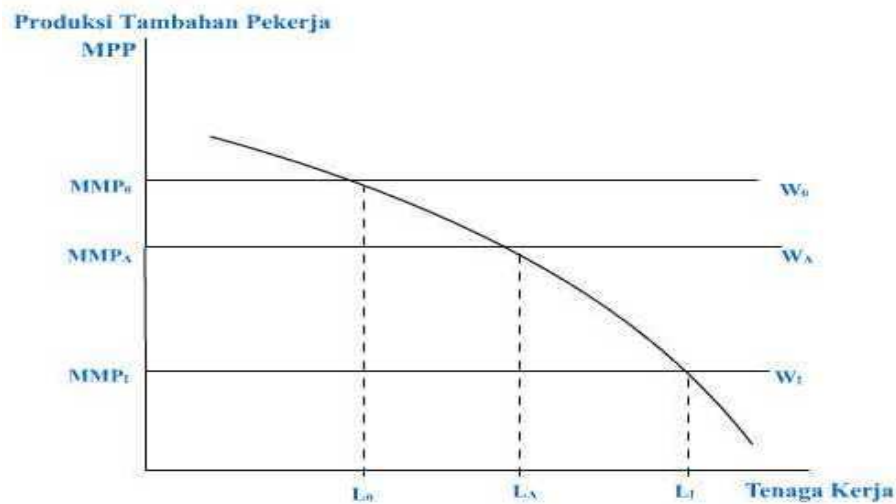
1. *kurva permintaan tenaga kerja.*

Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan tidak langsung atau *derived demand*. Dimana tenaga kerja dipekerjakan oleh perusahaan dengan

tujuan untuk digunakan dalam menghasilkan barang-barang yang akan mereka jual. Dengan demikian permintaan tenaga kerja ditentukan oleh sifat permintaan barang-barang yang diwujudkanannya. Pengusaha akan terus menambah jumlah pekerja selama pekerja tambahan tersebut dapat menghasilkan penjualan tambahan yang melebihi upah yang dibayarkan kepadanya. Seorang pengusaha akan baru berhenti menambah pekerjanya apabila tambahan pekerja yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan produksi yang sama nilainya. Ini adalah syarat yang perlu dipenuhi apabila perusahaan ingin memaksimumkan keuntungannya. Secara formula syarat pemaksimuman keuntungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

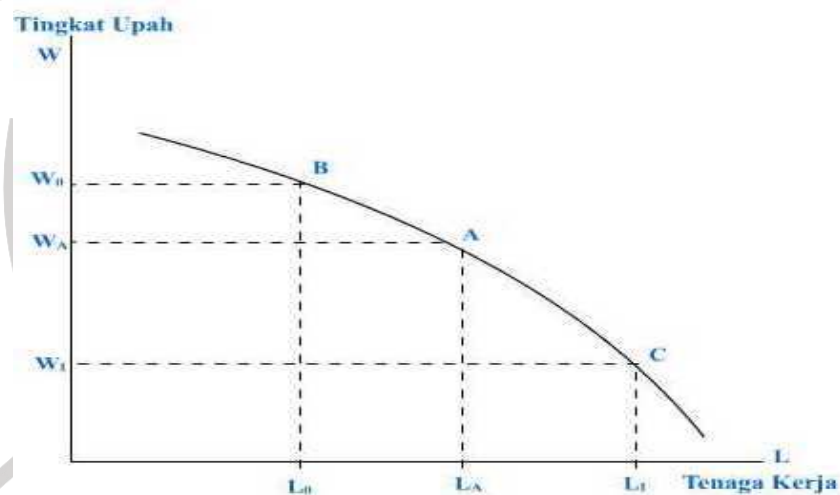
$$W = MPP_L \dots\dots\dots(2.5.) \qquad \qquad \qquad \text{(Sadono Sukirno, 2000:69)}$$

Dimana W adalah tingkat upah dan MPP_L adalah produksi marginal pekerja. Kedua variabel itu, yaitu W dan MPP_L dinyatakan dalam nilai fiskal (atau dalam nilai riil) dan bukan dalam nilai uang. Dalam analisis permintaan tenaga kerja terdapat hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dimana setiap tambahan pekerja akan menghasilkan produksi yang lebih rendah dari tambahan produksi yang diciptakan oleh pekerja sebelumnya. Berikut ini kurva (a). Kurva produksi marginal pekerja dan (b). Permintaan tenaga kerja. (Sadono Sukirno, 2000: 67)



Gambar 2.3. kurva (a) Produk Marginal Pekerja

(Sumber : Sadono Sukirno, 2000:70)



Gambar 2.4. kurva (b) Permintaan Tenaga Kerja

(Sumber : Sadono Sukirno, 2000:70)

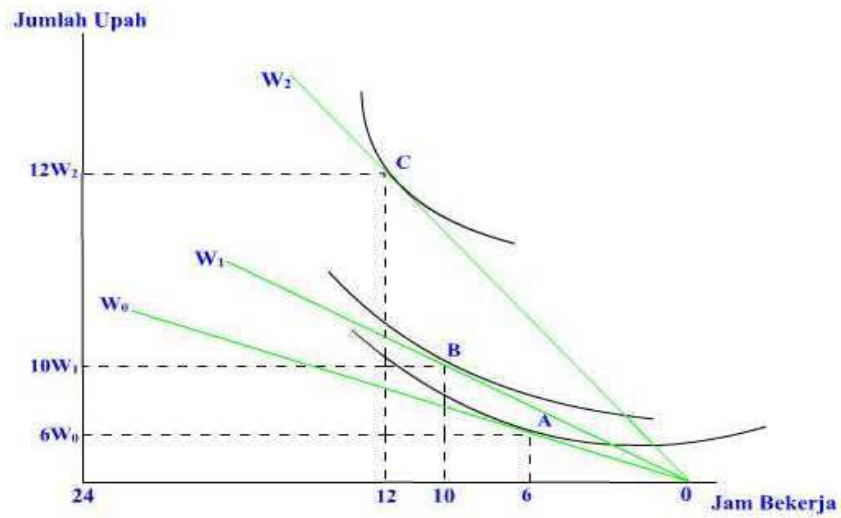
Dari kurva (a) menggambarkan hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Pada kurva tersebut pekerja L_0 dapat menghasilkan produksi tambahan sebanyak MPP_0 sedangkan pekerja L_1 hanya dapat menghasilkan produksi tambahan sebanyak MPP_1 . didapati $MPP_0 > MPP_1$ dan ini disebabkan karena $L_1 > L_0$.

Dan pada gambar (b) menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan tingkat upah dalam perekonomian adalah W_A . Kegiatan produksi mencapai produksi marginal sebanyak $MPP_A = W_A$ apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja sebanyak L_A . Dengan demikian seperti digambarkan oleh titik A dalam grafik (b) pada tingkat upah W_A sebanyak L_A tenaga kerja akan digunakan. Untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sehingga pada tingkat dimana produksi marginal sama nilainya dengan W_0 , misalkan $W_0 = MMP_0$. Dengan demikian permintaan untuk tenaga kerja adalah sebanyak L_0 . kemudian jika tingkat upah menurun ke tingkat W_1 . dan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan harus menggunakan tenaga kerja sehingga upah = produksi marginal dan ini dicapai di $W_1 = MMP_1$. Jadi sebanyak L_1 tenaga kerja akan digunakan. Permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tersebut diperoleh dari menarik satu garis melalui titik A, B, C, D. *Kurva permintaan tenaga kerja dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan semua permintaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian, yaitu menjumlahkan kurva seperti D_L .* (Sadono Sukirno, 2000:71)

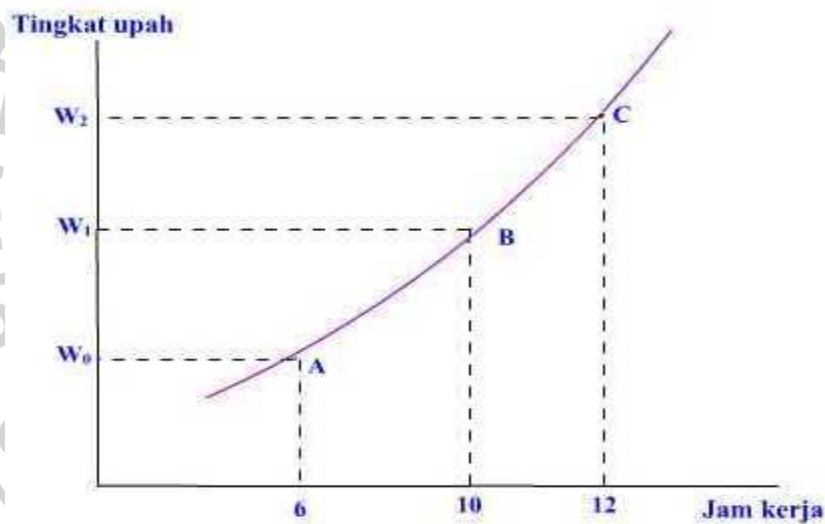
2. Menentukan kurva penawaran tenaga kerja

Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan di antara tingkat upah dengan jumlah jam kerja yang akan ditawarkan oleh seseorang pekerja. Gambar kurva (a) dibawah ini menunjukkan bagaimana seorang pekerja membuat pilihan di antara bekerja dan beristirahat untuk memaksimalkan kepuasannya.

Dalam grafik (a) sumbu datar menunjukkan jumlah waktu dari sebelah kanan ke kiri dan dimulai dari titik O. Garis lurus W_0 , W_1 , W_2 , menunjukkan tiga alternatif tingkat upah pekerja, yaitu nilai upah yang dibarakan untuk setiap jam kerja. Pada titik A, seorang bekerja selama 6 jam dan jumlah upah yang diterima pekerja dalam sehari adalah $6W_0$. Kenaikan upah menjadi W_1 menyebabkan keseimbangan kepuasan pekerja bergerak ke titik B, dimana seorang bekerja selama 10 jam dan jumlah upah yang diterimanya adalah $10W_1$. Apabila tingkat upah meningkat lagi yaitu menjadi W_2 , pekerja tersebut akan bekerja lebih giat lagi bekerja selama 12 jam dan jumlah upahnya meningkat menjadi $12W_2$ dan ditunjukkan pada titik C. Dan dibawah ini kurva penawaran tenaga kerja dari hasil penjelasan kurva sebelumnya. Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula penawaran tenaga kerjanya tinggi pula dan jika sebaliknya. Kurva penawaran tenaga kerja dalam perekonomian dapat diwujudkan dengan menjumlahkan penawaran tenaga oleh para pekerja

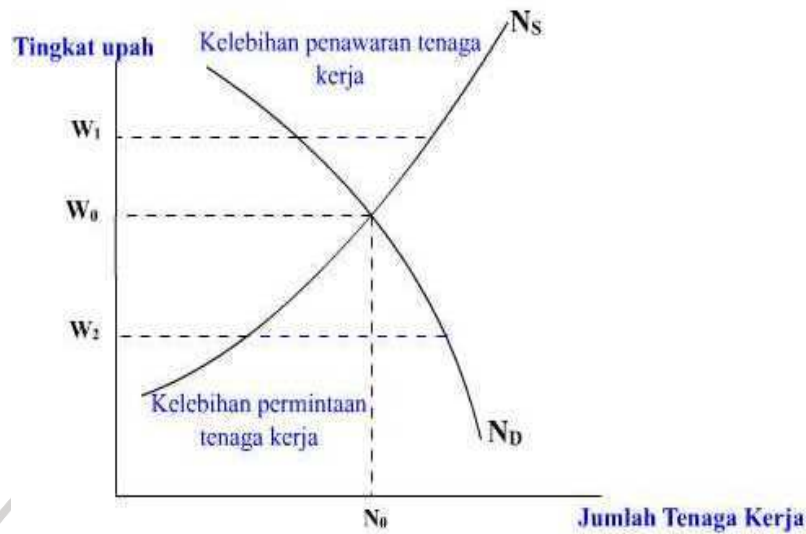


Gambar 2.5. Kurva (a) Pilihan seorang pekerja
(Sumber : Sadono Sukirno, 2000:72)



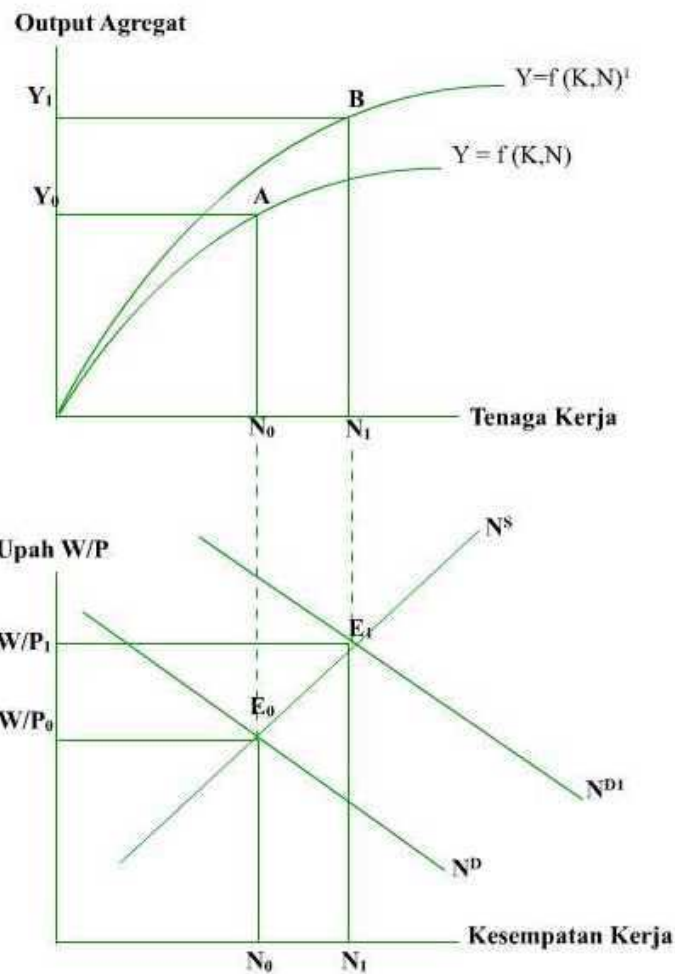
Gambar 2.6. Kurva (b) Penawaran tenaga kerja
(Sumber : Sadono Sukirno, 2000:72)

Keseimbangan di pasar tenaga kerja akan tercapai apabila permintaan tenaga kerja di pasaran adalah sama dengan penawarannya. Keadaan ini ditunjukkan pada kurva di bawah ini. (Sadono Sukirno:2000:74)



Gambar 2.7. Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
(Sumber :Sadono Sukirno, 2000:74)

Hubungan antara pertumbuhan output dan peningkatan kesempatan kerja didalam ekonomi diilustrasikan secara grafik pada gambar 2.3. didalam gambar ditunjukkan permintaan (N^D) dan penawaran (N^S) tenaga kerja dalam perekonomian. Keseimbangan dinantara permintaan dan penwaran tenaga kerja dicapai dititik E_0 dan berarti tingkat upah yang berlaku dalam perekonomian W/P_0 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah N_0 . pada mulanya dimisalkan fungsi produksi ekonomi tersebut ditunjukkan oleh kurva $Y = f(K, N)$. Titik A menunjukkan hubungan diantara tenaga kerja sebanyak N_0 dengan tingkat produksi nasional yang diwujudkan, yaitu sebanyak Y_0 . produksi nasional atau pendapatan nasional ini dinamakan *pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh*.



Gambar 2.8. Fungsi Produksi dan Pasar Tenaga Kerja
 Sumber :Tulus Tambunan, 1996:66

Di pasar tenaga kerja bertemu dua kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besar kecilnya volume kesempatan kerja dan tingkat upah riil. Volume kesempatan kerja melalui fungsi produksi menentukan jumlah output bertambah dari (Y_0 - Y_1). Kurva fungsi produksi yang tidak linear itu menandakan bahwa presentase pertumbuhan output di atas proporsional dari presentase penambahan tenaga kerja. ini berarti, tidak hanya volume kesempatan kerja saja, tetapi juga produktivitasnya meningkat. Sudut dari kurva fungsi produksi tersebut merupakan

marginal produk dari tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi yang menentukan berapa banyak volume kesempatan kerja yang diperlukan untuk membuat satu buah atau sejumlah output. Penambahan kesempatan kerja dicerminkan kurva ND ke kanan. (Tulus Tambunan, 1996:66-67)

2.1.3. Kesempatan Kerja Pandangan Keynes

Analisis Keynes mengenai kesempatan kerja berbeda dengan pendapat klasik. Menurut **Keynes (1963:274)**, *jika Permintaan efektif kurang, maka terdapat kekurangan kesempatan kerja dan meningkatnya permintaan efektif akan menambah kesempatan kerja.*

Pengertian permintaan efektif lebih lanjut dijelaskan oleh **Alfred dan Douglas (1975:72-73)**, Permintaan efektif sama dengan pendapatan nasional, yaitu hasil pendapatan, semua anggota dalam perekonomian, dan merupakan nilai dari output perekonomian yang bersangkutan. Karena harga total output nasional merupakan hal yang sama dengan hasil para pengusaha-pengusaha, yang dicapai dengan jalan menjual benda-benda. Dan disebabkan oleh karena semua benda atau merupakan benda konsumsi, atau alat produksi, maka permintaan efektif disatu pihak, adalah sama dengan pengeluaran nasional, untuk benda-benda konsumsi ditambah dengan pengeluaran nasional untuk benda-benda investasi. Dalam setiap perekonomian permintaan efektif akan menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan sebenarnya, untuk membeli produk-produk industri. Dengan demikian hal tersebut dapat dianggap sebagai hasil semua faktor-faktor produksi,

karena semua uang yang diperoleh oleh para pengusaha harus dibayarkan berupa upah, bunga modal, sewa dan laba.

Dalam analisisnya Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Pada hakikatnya analisis keynes tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya kemampuan untuk membayar barang-barang dan jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Bertambah besar permintaan efektif yang wujud dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi dan penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) dan faktor-faktor produksi. **(Sadono Sukirno, 2001:80)**

Dan menurut keynes apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-faktor produksi digunakan, kesempatan kerja akan bertambah dan faktor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Dengan demikian tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian, yaitu apakah tingkat kesempatan kerja penuh tergantung kepada sampai dimana besarnya permintaan efektif. Makin besar permintaan, makin kecil jurang di antara tingkat kegiatan ekonomi yang tercapai dengan kegiatan ekonomi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Sebagai akibatnya pengangguran akan menjadi lebih bertambah kecil. **(Sadono Sukirno, 2001:81)**

Komponen utama perbelanjaan agregat atau permintaan agregat terdiri dari empat komponen dasar yaitu :

- (1) total permintaan barang dan jasa oleh konsumen swasta (C)
- (2) total permintaan barang investasi oleh perusahaan-perusahaan swasta (I)
- (3) permintaan barang dan jasa untuk konsumsi maupun untuk investasi pemerintah (G)
- (4) surplus neraca perdagangan atau selisih ekspor atas impor (E - M).

Jika pendapatan nasional atau produk nasional Bruto (GNP/ Gross National Product) dinotasikan dengan Y, maka secara sederhana dapat ditulis :

$$Y = C + I + G + (E - M) \quad (2.6)$$

Dengan demikian pendapatan nasional atau pengeluaran (Y) ditentukan oleh permintaan agregat (C+I+G+(E - M)). Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional (N), yang ditunjukkan dalam bentuk fungsi produksi nasional dengan $Y = f(N, K, t)$, yang mana $f'_N > 0$ dan $f''_N < 0$. Untuk tingkat teknologi tertentu (t) dan faktor tanah dan modal yang tertentu (K), total output nasional (GNP *real*) mempunyai hubungan positif dengan kesempatan kerja. Semakin tinggi output nasional (Y) semakin tinggi kesempatan kerja (N). Tetapi ketika total kesempatan kerja dalam suatu masyarakat dibatasi oleh besarnya angkatan kerja yang aktif maka terdapat suatu dimana output nasional maksimum yang hanya dapat dicapai pada kondisi kesempatan kerja penuh (full employment). (J.J Sarungu, 2004:184)

Inti model Keynesian tersebut dan perbedaannya dengan model klasik adalah pada penekanan keynesian model bahwa dalam perekonomian pasar tidak

ada jaminan pendapatan nasional yang terjadi (actual) akan sama tepat dengan pendapatan nasional potensial (Y_f) seperti yang diyakini dalam model klasik dan karena itu tidak akan pernah ada penganggur. Menurut model Keynesian, segala sesuatu ditentukan oleh permintaan agregat. Dapat saja terjadi bahwa output nasional (Y_t) lebih kecil dari output potensial (Y_f). Dengan demikian terdapat sumber daya yang tidak semua dapat dimanfaatkan termasuk sumber daya manusia/ pekerja. Akibatnya terjadi kesenjangan (gap) antara kesempatan kerja nasional aktual (N_t) dan kesempatan kerja nasional pada pengerjaan penuh (N_f) dan ini berarti terdapat pengangguran. **(J.J. Sarungu, 2004:184-185)**

Selanjutnya, oleh karena pengeluaran konsumsi (C) dan pengeluaran investasi (I) ditentukan oleh pendapatan nasional dan *surplus trade* ditentukan selain oleh pendapatan nasional juga ditentukan oleh pendapatan luar negeri. Maka cara meningkatkan permintaan agregat adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G), misalnya anggaran pemerintah yang defisit sangat diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara output nasional aktual dan potensial dengan meningkatnya output nasional. Akibatnya kesempatan kerja akan meningkat. **(J.J. Sarungu, 2004:185)**

Saran model Keynesian dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja adalah menaikkan total permintaan agregat melalui peningkatan pengeluaran pemerintah secara langsung atau melalui kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung meningkatkan investasi swasta, antara lain dengan tingkat bunga pinjaman yang rendah, subsidi investasi, penurunan tarif pajak dan sebagainya. Sepanjang dalam perekonomian terdapat pengangguran dan kelebihan kapasitas

ekonomi maka penawaran barang dan jasa akan merespons meningkatnya permintaan secara otomatis. Keseimbangan baru tercapai dimana pendapatan nasional lebih tinggi dan kesempatan kerja pun meningkat.(**Todaro, 1977:24**)

Dari penjelasan tersebut maka teori Keynes pada dasarnya pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang, apabila output naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment (N) juga naik. Sebaliknya, *employment* turun apabila output turun.(**Boediono, 1980:83**)

2.1.4. Kesempatan Kerja Neo Klasik (Insentif Harga)

Intisari pemikiran yang terkandung dalam model intensif harga neoklasik yaitu :

1. Para produsen diasumsikan menghadapi dua harga relatif faktor produksi yaitu faktor produksi modal dan tenaga kerja. Mereka harus menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang tersedia sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan biaya produksi dalam rangka mencapai laba yang maksimal.
2. Selanjutnya diasumsikan pula bahwa para produsen mampu memproduksi output dengan berbagai proses teknologi produksi mulai dari teknologi padat karya hingga padat modal. Jadi apabila harga relatif tenaga kerja ternyata lebih mahal daripada harga modal, maka para produsen tersebut akan mempergunakan metode produksi padat modal. Singkatnya mereka senantiasa akan memilih teknologi produksi yang hemat memakai faktor produksi yang harganya relatif rendah.

3. Bahwa produsen akan berusaha melakukan kombinasi penggunaan antara faktor modal dan faktor tenaga kerja yang paling meminimalkan biaya produksi untuk mencapai output tertentu (*least cost combination of factors*). Atau dengan perkataan lain, produsen akan berusaha secara efisien dengan teknik produksi yang tepat. Hal ini akan sangat ditentukan oleh perbandingan harga faktor yang dihadapi oleh produsen (*relative factor prices*). Dalam hal ini harga dipandang merupakan sinyal kelangkaan faktor produksi. (Todaro, 1999:303-304)

2.2. TEORI UPAH

2.2.1. Definisi Upah

Didalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksud sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. (Sadono Sukirno, 2002:353-354)

Upah merupakan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional dan sub sektoral dalam pengupahan untuk meningkatkan, tingkat produktivitas tenaga kerja. Usaha meningkatkan kualitas

sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dengan tujuan meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menempatkan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat berpendapatan rendah. **(Priyono Tjiptoherijanto, 1993:2)**

Ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah :

1. Upah nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
2. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. **(Sadono Sukirno, 2002: 354)**

Peraturan pemerintah (PP) nomor 8 tahun 1981 menentukan definisi upah sebagai berikut :

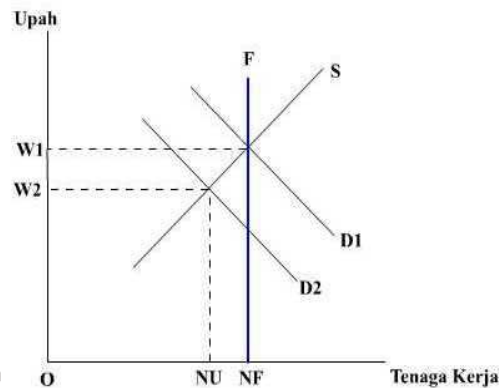
- Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atau dinilai dalam bentuk uang atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan undang-undang serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.
- Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional amupun subsektoral, dalam hal ini upah minimum itu dalah upah pokok dan tunjangannya.

- Upah minimum pokok adalah upah minimum pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun subsektoral. Dalam peraturan pemerintah secara jelas dan hanya termasuk upah pokoknya saja, tidak termasuk tunjangan. **(Tjipto Herijanto, 1993:1-2)**

2.2.2. Teori Upah Pandangan Klasik (Upah Fleksibel dan Kesempatan Kerja penuh).

Menurut pandangan klasik yang langsung menentukan *volume employment* dan output bukanlah tingkat harga tetapi struktur intern dari harga. Tegasnya keputusan produsen mengenai output dan employment adalah tergantung pada hubungan antara ongkosnya dan harga yang dibayar oleh pembeli outputnya. Dalam industri persaingan murni, laba maksimum akan tercapai pada tingkat output dimana harga sama dengan ongkos marginal. Setiap penjual menghasilkan output sampai pada tingkat ongkos marginalnya sama dengan harga yang sudah tertentu. **(Gardney Ackley, 1961: 161)**

Kaum klasik menganggap bahwa pasar tenaga kerja ini tiada bedanya dengan pasar-pasar barang lainnya. Bila harga dari tenaga kerja yaitu upah juga cukup fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja. perdefinisi tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya pada tingkat upah riil yang berlaku di padar tenaga kerja semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur dengan demikian, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku.



Gambar 2.9. kurva pasar tenaga kerja klasik

Sumber: Boediono1993:20

Pada kurva tersebut D1 adalah kurva permintaan akan tenaga kerja (total dari kebutuhan oleh produsen-produsen dan pemerintah). S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan berapa orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah riil. Kurva yang tegak F menunjukkan jumlah angkatan kerja. Pada posisi ini perekonomian berada pada *full employment*, dimana seluruh angkatan kerja yang bersedia bekerja dapat bekerja. Kalau pada suatu waktu produsen mengurangi produksinya, maka kurva permintaan akan tenaga kerja akan bergeser ke kiri menjadi misalnya D2, tingkat upah yang berlaku turun W1 ke W2, dan jumlah orang yang bekerja turun dari NF ke NU.

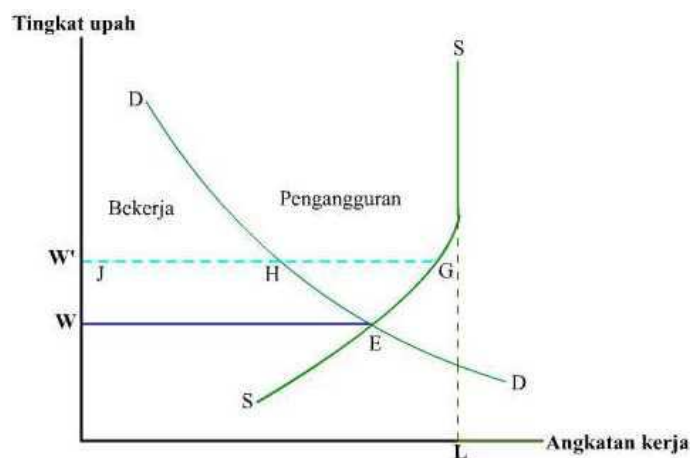
2.2.3. Teori Upah Keynes

Pandangan Keynes berbeda dengan klasik dan mengenai harga dan upah yang dianggap luwes atau fleksibel. Menurut Keynes beranggapan bahwa penurunan upah cenderung tidak luwes (*rigid*). Ketidakluwesannya itu disebabkan oleh faktor-faktor institusional, seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum, dan perjanjian implisit (antara majikan dan buruh). Dalam

periode menurunnya permintaan total terhadap barang dan jasa, perusahaan-perusahaan bereaksi terhadap penurunan penjualan dengan mengurangi produksi dan memberhentikan buruh, bukan dengan memotong upah. Menurut Keynes, penurunan harga pun sama kakunya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penurunan permintaan efektif pada awalnya menyebabkan penurunan produksi dan kesempatan kerja bukan penurunan harga. **(Komaruddin, 2001:89)**

Menurut Keynes **(Aisyah, 2006:23)**, dipasar tenaga kerja menganggap tinggi rendahnya penawaran tenaga kerja sebagai fungsi dari tingkat upah uang (upah nominal) dan bukan sebagai fungsi dari upah riil seperti yang dikatakan klasik. Keynes berkeyakinan bahwa para pemilik input tenaga kerja selalu kena ilusi uang.

Kunci untuk pendekatan ini terletak pada kenyataan bahwa upah tidak cepat menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan pasar tenaga kerja. Sebaliknya, upah cenderung memberikan respon amat lamban terhadap setiap guncangan ekonomi. Jika tingkat upah tidak berubah untuk menyeimbangkan pasar, dapat timbul ketidaksesuaian antara para pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidaksesuaian ini dapat mengarah ke pola-pola pengangguran yang dapat kita lihat dewasa ini. **(Samuelson dan Nordhaus, 1994:294)**



Gambar 2.10. Kurva Upah Yang Tidak Fleksibel
(Sumber: Samuelson dan Nordhaus, 1994:293)

Pada gambar 2.10. kurva tersebut menggambarkan tingkat upah yang tidak fleksibel atau rigid. Kurva ini mengasumsikan bahwa dalam situasi dimana terjadi guncangan terhadap perekonomian pasar, pasar tenaga kerja berada pada tingkat upah yang terlalu tinggi. Harga tenaga kerja (upah) adalah W' dan bukan pada tingkat keseimbangan pasar yaitu W . Pada tingkat upah yang terlalu tinggi, pekerja yang sedang mencari pekerjaan lebih banyak dibanding dengan jumlah kesempatan kerja. Jumlah pekerja yang mau bekerja pada tingkat upah W' adalah sebanyak G pada kurva penawaran, akan tetapi perusahaan-perusahaan hanya mau menerima pekerja sejumlah H , seperti yang tampak pada kurva permintaan. Karena tingkat upah melebihi tingkat upah keseimbangan pasar, maka terdapat surplus atau kelebihan tenaga kerja. Para pekerja yang menganggur yang digambarkan dengan garis terputus-putus sepanjang HG disebut pengangguran terpaksa, yang menyatakan bahwa mereka adalah para pekerja yang memenuhi kualifikasi dan mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan. Kelebihan tenaga kerja ini mendorong perusahaan-

perusahaan untuk membatasi kesempatan kerja dengan cara menetapkan ketentuan berupa tingkat keahlian yang lebih tinggi, menambah beban pekerjaan, dan menerima pekerja yang paling memenuhi kualifikasi atau yang paling berpengalaman saja. (Samuelson dan Nordhaus, 1994:295)

Situasi sebaliknya akan terjadi apabila tingkat upah terlalu rendah. Dalam perekonomian yang kekurangan tenaga kerja, para majikan tidak dapat memperoleh cukup jumlah pekerja untuk mengisi seluruh kesempatan kerja yang tersedia. Perusahaan-perusahaan menempelkan pengumuman di pintu-pintu gerbang dan di jendela-jendela kantor, memuat iklan di koran-koran dan bahkan mencari tenaga kerja baru di kota-kota. (Samuelson dan Nordhaus, 1994:295)

2.2.4. Teori Upah Karl Marx

Teori upah Karl Marx disebut upah menurut kebutuhan. Ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal, yang pertama adalah teori nilai. Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai sesuatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang demikian adalah :

1. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
2. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi, sesuatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh sebab itu harganya pun di beberapa tempat menjadi kira-kira sama.

3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh/pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut. **(Payaman J. Simanjuntak, 1985:106)**

Implikasi pandangan Marx tersebut dalam system pengupahan dan pelaksanaannya adalah :

1. Bahwa kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang macamnya dan jumlahnya kira-kira sama. Nilai setiap barang yang sama (walaupun terdapat di tempat yang berbeda) adalah sama juga. Oleh sebab itu, upah tiap-tiap orang juga kira-kira sama. Dalam hal ini sistem upah hanya sekedar menjalankan fungsi social, yaitu memenuhi kebutuhan konsumtif dari buruh.
2. Sistem pengupahan disini tidak mempunyai fungsi pemberian insentip yang sangat perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
3. Sistem control yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau bekerja menurut kemampuannya. Ini memerlukan sentralisasi kekuasaan dan system paksaan, yang dipandang bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan. **(Payaman J. Simanjuntak, 1985:107)**

2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai peningkatan dalam kegiatan perekonomian pada satu tahun tertentu di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan dari suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan.

Dan perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP di mana kenaikannya dibarengi, oleh perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang ada perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. (Suryana 2000: 4-5).

Arti lain laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Perhatian kita tujukan kepada 3 aspek yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang (Budiono :1987).

Menurut Kuznets (Todaro & Stephen C. Smith 2003: 99), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. dan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi dari suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi.

Laju pertumbuhan PDB adalah salah satu indikator utama ekonomi makro yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja suatu negara. Dan PDB yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah PDB riil. Dimana PDB riil adalah PDB dimana produk akhir yang dihasilkan dinilai menurut harga konstan pada tahun tertentu. Karena itu, istilah lain untuk PDB riil adalah PDB menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan statistik PDB atau PNB riil :

$$LPE_t = \frac{PDBriil_t - PDBriil_{t-1}}{PDBriil_{t-1}} \times 100 \quad (2.7.)$$

Dimana :

LPE_t = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen

$PDBrielt$ = adalah pendapatan nasional untuk tahun dimana kadar pertumbuhan ekonominya dihitung.

$PDBrielt-1$ = adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

Mengamati fluktuasi LPE dari tahun ke tahun dapat diidentifikasi pola siklus bisnis (business cycle) dari perekonomian yang bersangkutan. Siklus bisnis adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trendnya yang meliputi depresi, rekoperi, boom, dan resesi. (**Kusnendi 2002 : 21-22**)

Secara teoritis terdapat hubungan searah antara perkembangan perekonomian suatu negara dengan laju pertumbuhan tenaga kerja, yaitu pada saat perekonomian mengalami pertumbuhan maka pada saat itu pula terjadi peningkatan pada kesempatan kerja dan sebaliknya. Peningkatan kesempatan kerja terjadi karena adanya proses akumulasi yang didefinisikan sebagai proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi pada perekonomian suatu negara. Proses akumulasi yang dikaitkan dengan ketenagakerjaan ditandai dengan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas stok barang modal per pekerja di berbagai lapangan pekerjaan dan pada saat setiap unit usaha serta makin tingginya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk usia kerja. Angkatan kerja dan penduduk yang bekerja diberbagai lapangan pekerjaan, bersamaan dengan itu penguasaan teknologi dalam arti luas juga mengalami peningkatan (**Bagdja :2003**).

Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang peranannya cukup

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. bahwa jumlah serta proporsi faktor produksi (modal dan tenaga kerja) yang dimiliki suatu negara menentukan kapasitas produksi selain itu ini bukan hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksanaan pembangunan, akan tetapi juga karena pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Pendapatan ini selanjutnya akan dapat menimbulkan pasar yang cukup besar di dalam negeri, dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat terus-menerus dalam jangka panjang. (**Nopirin, 1995:128**)

Masalah kesempatan kerja biasanya muncul bila laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah pertumbuhan angkatan yang diiringi dengan terbatasnya kemampuan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Usaha-usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan selain pertumbuhan ekonomi juga upaya bagaimana untuk memperluas kesempatan kerja, karena jika tidak demikian maka jumlah pengangguran akan terus meningkat dan mengganggu proses pembangunan selanjutnya. (**Iif Syarufudin, 2006:30**).

Menurut **Todaro (1999: 124)** Ada tiga faktor atau komponen dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa ketiganya adalah :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia

2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi

Pembentukan modal sangatlah penting bagi pembentukan pertumbuhan ekonomi karena akumulasi modal akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. **(Todaro, 1999:124)**

Menurut **Kuznets** pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemudian kapasitas disini diperlukan suatu usaha untuk mencapainya yaitu dengan membuka investasi, maka pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. **(Todaro, 2003 : 98)**

Sehingga suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu perluasan modal untuk mencapai kenaikan output yang diinginkan. Dan untuk meningkatkan kenaikan output diperlukan suatu penambahan faktor produksi, salah satu faktor produksi yaitu manusia atau tenaga kerja. kemudian terciptalah kesempatan kerja yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan adanya investasi dapat mendorong penambahan kesempatan kerja. Dimana laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan output yang berkesinambungan yang selanjutnya kenaikan

output ini memerlukan suatu penambahan tenaga kerja. (**Sadono Sukirno, 2001:14**)

Proses peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan proses produksi tenaga manusia dikombinasikan dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain kalau terjadi proses produksi maka terjadilah kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja. Hal ini dijelaskan jika seorang bekerja maka ia memperoleh barang dan jasa yang diserahkan kepada pengusaha. Barang dan jasa ini oleh pengusaha akan di jual di pasar untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan, yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai produksi yang akan datang dan sebagian kan digunakan membayar keuntungan bagi penanaman modal. Hasil yang kedua ialah pendapatan bagi dirinya sendiri. Pendapatan ini memberikan daya beli bagi keluarganya, sehingga mereka mampu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., baik yang dihasilkan oleh perusahaan tempat dia bekerja maupun perusahaan lain. Jika kemampuan membeli ini dimiliki semua anggota masyarakat maka ada permintaan efektif yang cukup besar. Dengan mengetahui bahwa konsumen terdiri atas keluarga pekerja, dan dengan harapan bahwa para pekerja akan mempunyai pekerjaan dan pendapatan di waktu mendatang, maka produsen dapat meramalkan bahwa di waktu mendatang, maka para produsen dapat meramalkan bahwa di waktu mendatang para konsumen akan mempunyai daya beli sehingga akan terjadi lagi permintaan efektif yang cukup besar dan kuat mengenai barang yang dibuatnya. Dengan demikian dia akan membuat keputusan untuk memproduksi kembali barang-barangnya. Maka lahirlah kesempatan kerja generasi yang kedua,

demikian proses tersebut berulang-ulang seterusnya dalam pertumbuhan ekonomi. (Soeroto, 1986: 35).

Menurut **Kuznets** pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemudian kapasitas disini diperlukan suatu usaha untuk mencapainya yaitu dengan membuka investasi, maka pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. (Todaro, 2003 : 98)

Sehingga suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu perluasan modal untuk mencapai kenaikan output yang diinginkan. Dan untuk meningkatkan kenaikan output diperlukan suatu penambahan faktor produksi, salah satu faktor produksi yaitu manusia atau tenaga kerja. kemudian terciptalah kesempatan kerja yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan adanya investasi dapat mendorong penambahan kesempatan kerja. Dimana laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan output yang berkesinambungan yang selanjutnya kenaikan output ini memerlukan suatu penambahan tenaga kerja. (Sadono Sukirno, 2001:14)

Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui *Elastisitas Kesempatan Kerja*.

Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat padat modal atau padat karya, meskipun penggambaran dari sudut pandang makro. Adapaun rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah :

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta PDB} \quad (2.8.)$$

Keterangan :

E_{kk} = Elastisitas kesempatan kerja

ΔKK = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

ΔPDB = Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

Rumus ini dapat dikembangkan untuk menentukan besarnya target laju pertumbuhan ekonomi dengan asumsi elastisitas kesempatan kerja pertumbuhan kesempatan kerja diperkirakan sama dengan periode tertentu. Angka elastisitas kesempatan kerja semakin tinggi memberi indikasi kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja juga semakin tinggi. Mengarah pada padat modal dan terutama bila didukung angka ICOR yang tinggi. Dari model elastisitas kesempatan kerja tersebut secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. **(Suseno Triyanto Widodo, 1990:110-112)**

Dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja juga dapat dijelaskan melalui suatu model ekonomi makro yang sederhana yang

terdiri dari sub model yaitu : model sektor riil (pasar barang) dan model pasar tenaga kerja (faktor produksi). Dalam hal ini adanya persamaan yang pertama menggambarkan keseimbangan di pasar barang (output). Penawaran agregat (Y_s) = permintaan agregat (Y_d), kedua yaitu permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga pembentukan investasi bruto (I_b) dan pengeluaran pemerintah (G).

$$Y_s = Y_d \dots\dots\dots (2.9)$$

$$Y_d = C + I_b + G \dots\dots\dots (2.10)$$

Ketiga yaitu fungsi produksi standar dimana output agregat adalah fungsi dari dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja (N) dan barang modal (K).

$$Y_s = F_a(N, K) \dots\dots\dots (2.11)$$

Tiga persamaan berikutnya menggambarkan keadaan pasar tenaga kerja yakni persamaan pertama menggambarkan keseimbangan di pasar tenaga kerja (labour market) permintaan tenaga kerja (N_d) = Penawaran Tenaga Kerja (N_s).

$$N_d = F_{nd}(Y_s, W, r) \dots\dots\dots (2.12)$$

$$N_s = F_{ns}(W) \dots\dots\dots (2.13)$$

$$N_d = N_s \dots\dots\dots (2.14)$$

(Tulus Tambunan : 2000)

2.3.1. Hukum Okun

Kemudian salah satu teori yang menjelaskan hubungan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah *Hukum Okun*. *Hukum Okun* menjelaskan hubungan antara output dan tingkat pengangguran dengan asumsi bahwa output dan employment bergerak sama, jadi perubahan pada output akan menghasilkan

perubahan yang sama pada employment juga diasumsikan bahwa angkatan kerja adalah konstan, jadi satu perubahan pada employment akan menyebabkan satu perubahan pada tingkat pengangguran. Dan persamaan Hukum Okun adalah sebagai berikut :

$$\frac{Q^* - Q}{Q} = \alpha(u - u^*) \dots\dots\dots(2.15) \quad \text{(Samuelson\& Nordhaus, 2001:56)}$$

Keterangan :

Q^* = Output potensial

Q = output aktual

u = tingkat pengangguran

u^* = tingkat pengangguran pembandingan

α = koefisien okun.

Hukum Okun ini yang menerangkan mengenai hubungan antara output aktual dan potensial (GDP) dan pengangguran. Dimana *Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen.* (Samuelson\& Nordhaus, 2001:365)

Ini berarti jika dicontohkan, jika permulaan GDP adalah 100 persen dari angka potensialnya dan menurun menjadi 98 persen potensial, angka pengangguran akan meningkat sekitar 1 persen, contohnya dari 6 persen menjadi 7 persen. Sebuah konsekuensi penting dari Hukum Okun adalah GDP aktual harus berkembang secepat GDP potensial untuk menjaga angka pengangguran tidak meningkat. GDP harus tetap berjalan hanya untuk menjaga angka pengangguran

tetap ditempatnya. Selain itu, jika ingin menurunkan angka pengangguran, GDP aktual harus berkembang lebih cepat daripada GDP potensial. (Samuelson & Nordhaus, 2004 :365-366).

Dari Hukum Okun tersebut terdapat istilah GDP potensial dan GDP aktual. Dimana masing-masing mempunyai pengertian GDP potensial adalah tingkat GDP yang dapat dihasilkan perekonomian jika seluruh sumber daya yang dimiliki perekonomian tersebut dimanfaatkan secara penuh. GDP potensial ini disebut juga sebagai GDP kesempatan kerja penuh atau *full employment output*. Sedangkan GDP aktual menunjukkan tingkat GDP yang benar-benar dapat dihasilkan oleh suatu perekonomian. kriteria antara GDP potensial dan GDP aktual yaitu :

- GDP aktual = GDP potensial, perekonomian dikatakan berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh.
- GDP aktual < GDP potensial, perekonomian dikatakan berada dalam kondisi di bawah kesempatan kerja penuh (full employment).
- GDP potensial – GDP aktual = senjang output (output gap) yaitu jumlah output (barang dan jasa) yang hilang karena perekonomian bekerja di bawah kesempatan kerja penuh. (Kusnendi, 2002:21-22)

2.3.2. Teori Lewis : Perkembangan Ekonomi Dalam Keadaan Penawaran Tenaga Kerja Yang Tidak Terbatas.

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dimana populasi jumlah penduduknya surplus. Populasi jumlah penduduk yang selalu

bertambah dan surplus ini mengakibatkan jumlah tenaga kerja di Indonesia juga mengalami kelebihan tenaga kerja. salah satu teori yang sesuai dengan keadaan Indonesia yang menghadapi kelebihan tenaga kerja ini adalah teori Lewis yaitu teorinya mengenai dua sektor. Dalam analisa Lewis perekonomian dibedakan menjadi dua sektor yaitu :

1. Sektor Tradisional (Subsistence), yaitu sektor yang kegiatannya terutama ditunjukan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari setiap keluarga. Dimana disektor sebagian dari tenaga kerja produksi batasnya adalah sangat minimal sekali dan dapat dianggap sama dengan nol dan adakalanya negatif.
2. Sektor Kapitalis (Modern), disektor kapitalis ini tingkat upah lebih tinggi dari pada tingkat upah di sektor tradisional.

Perbedaan antara sektor tradisional dan sektor kapitalis tersebut karena beberapa faktor yaitu karena biaya hidup di sektor kapitalis lebih tinggi, para pekerja harus hidup di kota-kota besar yang cara hidupnya lebih berdisiplin dari pada di sektor tradisional, sebagai akibat dari cita rasa hidupnya yang lebih tinggi disektor kapitalis sehingga memerlukan pendapatan yang tinggi, dan adakalanya juga disebabkan adanya persatuan-persatuan pekerja. **(Sadono Sukirno, 1985 : 130)**

Menurut teori Lewis ini, proses pembangunan bermula dan selanjutnya terus-menerus berlangsung akibat dari penanaman kembali keuntungan yang diciptakan dalam sektor kapitalis. Apabila sektor kapitalis memperoleh keuntungan, dana tersebut akan ditanamkan kembali oleh para pengusaha. Kegiatan ini akan menciptakan sejumlah kesempatan kerja di sektor kapitalis,

produksi di sektor ini meningkat dan dengan demikian pembangunan ekonomi tercipta. Akibat dari perkembangan ini pada masa berikutnya akan tercipta keuntungan yang lebih besar dan keuntungan ini juga akan ditanamkan kembali oleh para pengusaha. Proses perubahan seperti ini akan berulang-ulang berlaku sehingga makin lama makin besar tingkat keuntungan yang diciptakan di sektor kapitalis, dan mengakibatkan berlakunya tingkat penanaman modal yang lebih tinggi dan perkembangan ekonomi yang bertambah maju. Maka tenaga kerja yang bekerja di sektor kapitalis makin lama makin bertambah banyak jumlahnya. Proses pembangunan ini akan terus menerus berlangsung sehingga dalam perekonomian itu tidak terdapat lagi kelebihan tenaga kerja. (Sadono Sukirno, 1985:129)

Dari teori Lewis ini berpendapat bahwa kenaikan produktivitas merupakan keadaan yang menyebabkan proses pembangunan terus-menerus berlangsung. Dengan adanya kenaikan produktivitas maka produksi batas tenaga kerja dari sektor kapitalis dapat dipertahankan supaya besarnya tetap lebih daripada tingkat upah di sektor tersebut. Keadaan ini memungkinkan para pengusaha untuk terus menerus mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif mereka. (Sadono Sukirno, 1985:130-132)

2.3.3. Model Pertumbuhan Output dan Kesempatan kerja: Argumentasi Konflik

Perhatian utama dari model-model pertumbuhan yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960an (dan

kemudian muncul kembali dalam bentuk aliran ekonomi yang sangat menekankan pentingnya sisi penawaran pada awal tahun 1980-an) difokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model-model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, maka model tersebut mengisyaratkan bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan GNP-nya negara-negara dunia ketiga akan dapat pula memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Perangkat teoritis utama yang dipakai untuk menjelaskan proses pertumbuhan adalah model sederhana Harrod-Domar. Walaupun variasi-variasi canggih dari model ini namun gagasannya tetap sama saja. Menurut model-model tersebut pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai suatu hasil dari kombinasi pemupukan tingkat tabungan dan akumulasi modal fisik yang menjadi dampak pertamanya di satu pihak, dengan rasio modal-output agregat tertentu, tingkat pertumbuhan output nasional serta kesempatan kerja dapat dimaksimalkan dengan cara memaksimalkan tingkat tabungan dan investasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat muncul secara otomatis berkat adanya pemupukan dan pengerahan tabungan domestik dan cadangan devisa untuk melakukan investasi secara besar-besaran di sektor industri. **(Todaro, 1999:300)**

Secara definitif, tingkat pertumbuhan output (Y) dikurangi dengan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Y/L) kurang lebih sama dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja (L). Secara matematis hubungan-hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

$$\frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta(Y/L)}{Y/L} = \frac{\Delta L}{L} \quad (2.16)$$

Itu berarti seandainya tingkat output tumbuh sebesar 8 persen per tahun sedangkan kesempatan kerja hanya meningkat 3 persen, maka selisih peningkatan output tersebut bersumber dari kenaikan produktivitas tenaga kerja. Asumsi disini yaitu rasio modal output yang konstan tersebut kemudian disejajarkan dengan rasio output –tenaga kerja yang konstan. Selanjutnya dengan asumsi produktivitas tenaga kerja yang konstan, maka kenaikan sebesar 10% dalam output nasional (GNP) akan selalu disertai dengan 10% kenaikan kesempatan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya, seandainya tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga pihak produsen dengan sendirinya hanya memerlukan lebih sedikit tenaga kerja untuk memproduksi output dalam jumlah yang sama, maka 10 % kenaikan output itu hanya mampu meningkatkan kesempatan kerja dalam proporsi yang lebih rendah, katakanlah 3 %.(**Todaro, 1999:301**)

2.3.4. Model pertumbuhan Output dan Kesempatan Kerja: Argumentasi

Kesesuaian.

Secara umum kenaikan produktivitas kerja merupakan sesuatu yang sangat diinginkan. Namun lebih dari itu, yang sebenarnya sangat didambakan adalah kenaikan produktivitas total, yakni kenaikan hasil dan output per unit dari seluruh sumber daya. Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui berbagai mekanisme, beberapa di antaranya bersifat positif namun ada pula sebagian di antaranya yang bersifat negatif. Peningkatan pendidikan, pelatihan serta penerapan manajemen yang lebih baik semuanya merupakan mekanisme yang positif bagi peningkatan produktivitas. Akan tetapi, kenaikan tingkat

produktivitas yang bersumber akibat penggunaan lebih banyak modal dalam proses produksi atau sehubungan dengan adanya impor mesin-mesin dan peralatan serba canggih yang cenderung mengurangi pemakaian tenaga kerja tidak selamanya bisa dikatakan positif karena hal tersebut jelas akan dapat merugikan kepentingan negara-negara yang penduduk atau pencari kerjanya sangat banyak. Akumulasi modal ini tidak hanya membuang-buang sumber daya keuangan domestik serta devisa, tetapi juga akan menghalangi upaya-upaya dalam rangka menciptakan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, impor barang modal yang hemat tenaga kerja dalam kenyataannya justru cenderung mengurangi total faktor produktivitas sehingga akan menaikkan biaya produksi rata-rata. Walaupun produktivitas kerja meningkat, keuntungan yang bisa diharapkan tidak akan banyak berubah. Dengan kalimat lain, meskipun biaya tenaga kerja rata-rata menurun, namun biaya produksi rata-rata naik karena adanya penggunaan mesin di bawah kapasitas terpasang, padahal biaya operasinya tergolong mahal. Akibatnya negara-negara berkembang itu tidak mampu mencapai tingkat penggunaan yang efisien. **(Todaro, 1999:301)**

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa model-model Harrod-Domar yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi, beserta segenap kebijakan yang menajdi implikasinya, memang dapat mempercepat pertumbuhan output namun kurang bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. apabila tujuan utama pembangunan di suatu negara adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan GNP, maka pendekatan tersebut memang dapat dibenarkan. Akan tetapi seandainya yang lebih dipentingkan

adalah penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, maka model tersebut tidak cocok diterapkan. Pemerintah negara yang bersangkutan perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang lain, seperti lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil yang tentu saja lebih baik karena mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. (Todaro, 1999:302)

Pandangan-pandangan konvensional tahun 1950-an dan 1960-an yang mengatakan bahwa pertumbuhan output dan pemerataan pendapatan merupakan tujuan yang saling bertolak belakang tersebut kini telah ditingkalkan. Para ekonom pada umumnya dewasa ini berpendapat bahwa strategi pembangunan yang berorientasikan kepada penciptaan lapangan kerja juga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kesesuaian ini terutama sekali dapat dilihat pada pola pertumbuhan dan pembangunan sektor pedesaan dan perkotaan berskala kecil. Terciptanya lebih banyak kesempatan kerja berarti tersedianya lebih banyak sumber-sumber pendapatan potensial bagi kalangan penduduk miskin. Kenaikan pendapatan mereka pada gilirannya akan lebih memacu peningkatan permintaan atas barang-barang konsumsi produksi dalam negeri. Karena produk-produk buatan dalam negeri tersebut pada akhirnya akan semakin memacu pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (secara agregat ini merupakan pertumbuhan ekonomi nasional). Dengan demikian, pertumbuhan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang senantiasa bertentangan, melainkan merupakan dua fenomena yang saling memperkuat dan saling menunjang. (Todaro, 1999:302)

2.4. PENELITIAN SEBELUMNYA

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1. Fuad Assadin dan Faried WijayaMansoer (2001)	PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA : Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur	<p>Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan kesempatan kerja. biasanya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, cenderung semakin membuka kesempatan kerja, dan begitu juga sebaliknya. 2. Investasi di Kaltim cenderung masih mahal, yang tampak sari rata-rata ICOR sebesar 7,1 keculai beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan sektor transportasi. Investasi di sektor jasa kuranf menarik bagi para investor di Kaltim. 3. Perhitungan masing-masing komponen dan total komponen <i>Shift-Share</i> yang mencerminkan kompenen pertumbuhan nasional menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kaltim lebih tinggi dibandingkan beberapa propinsi lain. 4. Secara keseluruhan hasil pembobotan masing-masing komponen menghasilkan urutan optimasi prioritas sektor sebagai berikut. Pertama adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran, listrik, gas air bersih, industri pengolahan, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta terakhir sektor pertanian.
2. Achmad Mujahid Jatmiko (2006)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Bekasi	<p>Model yang digunakan terdiri dari 2 persamaan dengan pendekatan model <i>Recursive</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Persamaan Pertama</i>, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan total dan sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan fungsi produksi dengan variabel stok modal swasta dan jumlah tenaga kerja. 2. <i>Persamaan kedua</i>, untuk mengatahui pengaruh pengeluaran pembangunan total dan sektoral baik melalui transmisi pertumbuhan ekonomi hasil estimasi persamaan pertama, maupun pengaruhnya secara langsung terhadap tingkat kesempatan kerja. <p>Hasil dari peneltian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengeluaran pembangunan baik total maupun

		<p>sektoral, secara statistik mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 99%. Pengaruh pertumbuhan ekonomi estimasi (<i>fitted value</i>) adalah signifikan negatif terhadap tingkat kesempatan kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaruh pengeluaran pembangunan total secara langsung terhadap tingkat kesempatan kerja menunjukkan pengaruh yang signifikan positif pada tingkat kepercayaan 90%. 3. Sedangkan pengaruh pengeluaran pembangunan per sektoral secara langsung memperlihatkan hasil yang berbeda. Sektor primer dan sekunder mempunyai signifikan positif terhadap peningkatan kesempatan kerja, masing-masing dengan tingkat kepercayaan 99% dan 90%, sedangkan sektor tersier tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja.
3. Sri Roshidayati (2006)	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di 20 Kabupaten/Kota Jawa Barat Periode 2001-2004</p>	<p>Dengan dasar heterogenitas antar daerah tersebut, model analisis yang dipergunakan adalah model analisis ekonometrik regresi linier berganda dengan <i>metode reursif</i> panel data untuk 20 Kabupaten/kota Jawa Barat periode 2001-2004. Hasil regresi dengan menggunakan <i>data cross section</i> 20 kabupaten/kota di Jawa Barat serta <i>series</i> data tahun 2001-2004, estimasi data panel dengan model <i>Random Effect</i> dengan metode GLS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran pemerintah dan investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta akan terditorsi apabila tidak diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran karena tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.
4. Ismi Iswandi (2004)	<p>Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Ketenagakerjaan di Era Krisis</p>	<p>Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian Indonesia di era krisis mengalami sedikit peningkatan akan tetapi peningkatan tersebut masih jauh bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di era sebelum krisis. 2. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi mampu menambah kesempatan kerja tetapi tetap saja diiringi dengan penambahan jumlah penganggur terbuka +1/2 menganggur. Artinya pertumbuhan ekonomi yang rendah

		<p>ternyata tidak bisa menambah jumlah kesempatan kerja bahkan menambah pengangguran.</p> <p>3. Tidak bertentangan bila dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era krisis sebagai pertumbuhan yang gagal karena tidak mampu mengurangi jumlah kesempatan kerja dan tidak bertentangan bila dikatakan terjadi proses pemiskinan.</p>
<p>5. Direktorat Ketenagakerjaan BAPPENAS (2004)</p>	<p>UPAH MINIMUM: Sebuah Kajian Tentang Dampaknya Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Di Masa Krisis</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah minimum menjadi mengikat (<i>binding</i>) untuk sebagian besar pekerja di sektor formal. Analisa kualitatif dari survei yang dilakukan kurang dari 30% pekerja memperoleh upah di bawah upah minimum. 2. Upah minimum yang meningkat relatif tinggi mengurangi kesempatan kerja sektor formal. 3. Selain itu kenaikan upah minimum mempunyai dampak yang besar pada kesempatan kerja kelompok-kelompok pekerja tertentu, seperti pekerja wanita, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik. 4. Peningkatan Upah minimum menekan pendapatan di sektor informal. 5. Dampak peningkatan upah minimum memberatkan perusahaan kecil. 6. Peningkatan upah minimum terhadap upah pekerja di beberapa kelompok perusahaan berbeda-beda. Pada perusahaan padat modal hanya 20% pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum. Pada perusahaan asing hanya 5 % dan pada perusahaan yang berorientasi ekspor hanya 14% pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum. 7. Pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong kesempatan kerja yang lebih besar daripada yang hilang karena kebijakan upah. Namun dalam iklim pertumbuhan ekonomi yang rendah seperti yang dialami Indonesia tahun 2000-2001, kenaikan tinggi pada upah minimum kemungkinan besar akan mempunyai efek merugikan bagi para pekerja, khususnya mereka yang rentan terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi pasar tenaga kerja
<p>6. Tata Mustasya, SE (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute). (2005)</p>	<p>KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL: TEPATKAH UNTUK INDONESIA SAAT INI?</p>	<p>Dampak pasar tenaga kerja yang fleksibel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat upah yang rendah dan aturan perlindungan kerja yang minimal dalam pasar tenaga kerja fleksibel akan menimbulkan dampak positif dalam bentuk tambahan kesempatan kerja, resikonya mengancam kelayakan hidup pekerja. 2. Tidak ada jaminan sosial bagi warga negara yang berpenghasilan tidak layak <p>Dampak pasar tenaga kerja kaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan rekrutmen yang kaku

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasar tenaga kerja yang kaku mengurangi kesempatan kerja 3. UMP terlalu tinggi memberatkan pengusaha sehingga pengusaha bisa melakukan pengurangan tenaga kerja dan hanya mempekerjakan karyawan yang produktif. Pengurangan jumlah karyawan juga terjadi akibat pergantian tenaga kerja dengan barang modal 4. Aturan PHK yang memberatkan pengusaha, karena pengusaha harus memberikan pesangon dan aturan yang macam-macam hingga menyebabkan tambahan biaya yang tinggi. 5. Perlindungan pekerja yang berlebihan <p>Rekomendasi kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat diimplementasikan jika pemerintah telah menyediakan jaminan sosial bagi warga negara. 2. Pemerintah harus menempuh “jalan ketiga” sebelum mengimplementasikan pasar tenaga kerja fleksibel secara penuh. Jalan ketiga ini mempertemukan kepentingan pengusaha dan pekerja sehingga sejalan. Pemerintah tetap mengatur masalah rekrutmen, upah, PHK dan perlindungan pekerja dan dilain pihak membuka ruang seluas-luasnya untuk memperoleh masukan bagi substansi peraturan perundang-undangan. Dan tetap melindungi pekerja. 3. Dalam masa transisi ke pasar tenaga kerja fleksibel, menerapkan kebijakan alternatif yang melindungi pekerja tetapi memperhitungkan fleksibilitas, antara lain perlindungan kerja dan upah minimum harus memperhitungkan variasi kabupaten/kabupaten dan sektor ekonomi secara lebih detil dibandingkan saat ini. 4. Pemerintah harus memfasilitasi dialog, komunikasi, dan negosiasi untuk mendorong hubungan baik antara pengusaha dan pekerja. 5. Menetapkan kebijakan yang tepat sebagai komplemen kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel.
--	--	--